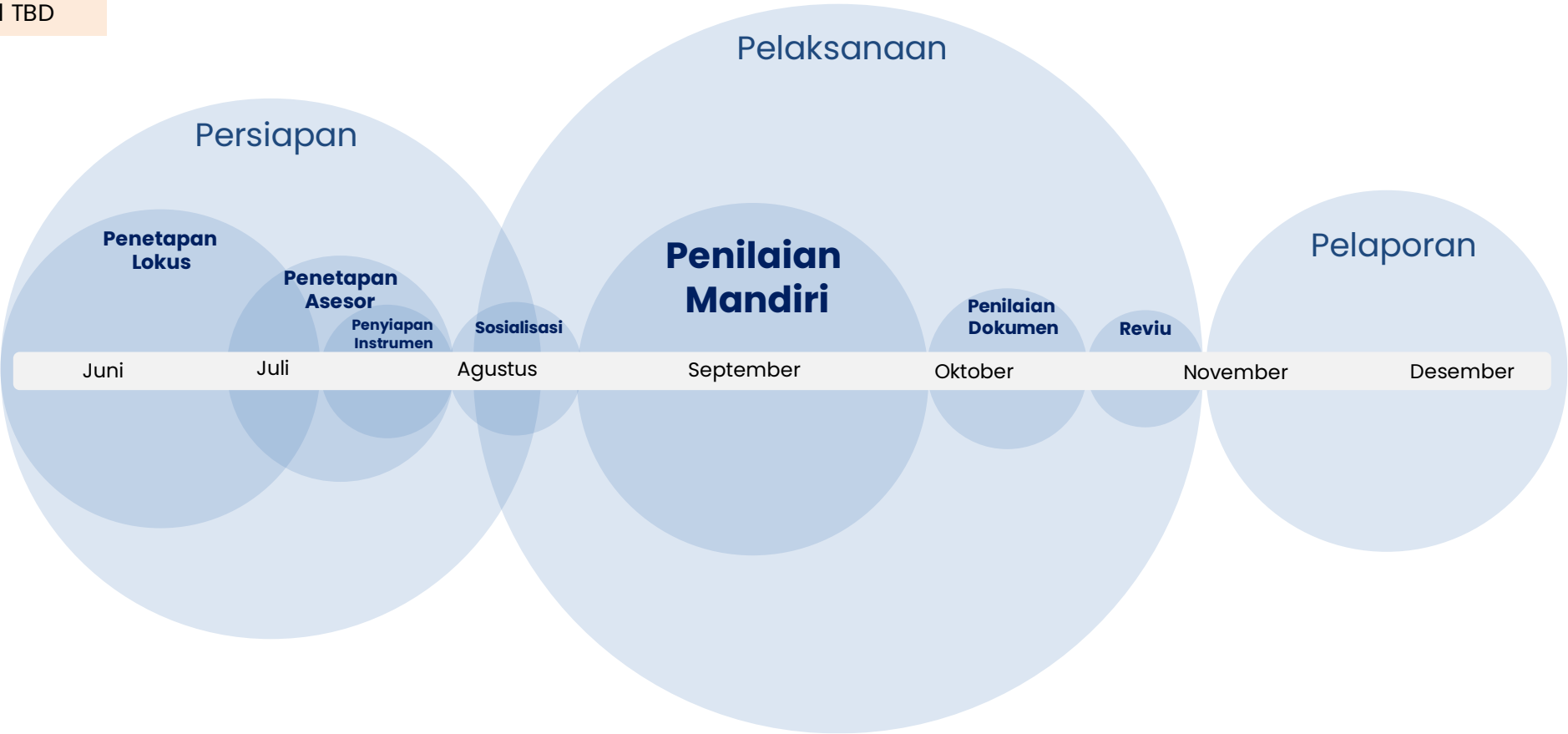


Timeline Kegiatan Pemantauan SPBE 2025

Tanggal detail TBD

Pemantauan SPBE 2025 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Evaluasi SPBE 2024 untuk melihat perbaikan hasil rekomendasi atas Evaluasi SPBE 2024. Serta difokuskan pada lokus referensi **RPJMN**



No.	Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Output	Durasi	% tugas	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
							w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
1	Persiapan																																	
2	Pelaksanaan																																	
	Sosialisasi Pemantauan SPBE																																	
	Penilaian Mandiri																																	
	Penilaian Dokumen																																	
	Pelaporan Penilaian Dokumen																																	
	Reviu penilaian Asesor																																	
3	Pelaporan																																	
	Kepmen Hasil																																	

Penurunan Kemiskinan : Fokus dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional - DTSEN (INPRES 4/2025) dan program Perlindungan Sosial

Iklim Dunia Usaha: Fokus dukungan pada “Easy Doing Business” berupa layanan digital untuk perizinan berusaha serta untuk hilirisasi dan industrialisasi

Administrasi Pemerintahan: Layanan digital pengadaan barang/jasa, digitalisasi manajemen ASN, sistem informasi kearsipan nasional dan integrasi sistem informasi kinerja nasional

Penerimaan Negara: Sistem Perpajakan

Layanan Siklus Hidup: Fokus dukungan pada program Layanan Identitas Digital Terpadu, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Digitalisasi Pembelajaran (Program Sekolah Unggulan), dan Transformasi Layanan Pertanahan

Total Instansi Pusat = 46

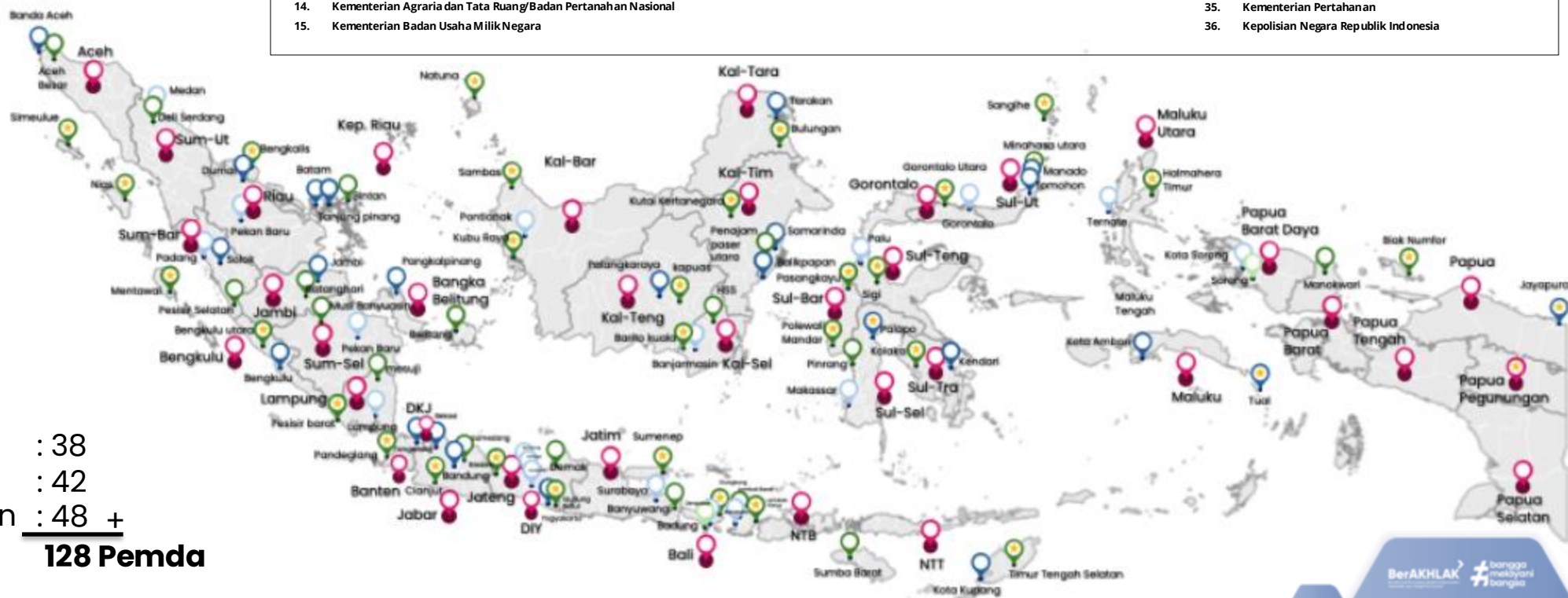
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Komunikasi dan Digital
13. Kementerian Agama
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
16. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Kementerian Kelautan dan Perikanan
19. Kementerian Kesehatan
20. Kementerian Koperasi
21. Kementerian Lingkungan Hidup
22. Kementerian Pekerjaan Umum
23. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
24. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
25. Kementerian Kebudayaan
26. Kementerian Perdagangan
27. Kementerian Perindustrian
28. Kementerian Pertanian
29. Kementerian Sosial
30. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
22. Arsip Nasional Republik Indonesia
23. Badan Gizi Nasional
24. Badan Informasi Geospasial
25. Badan Kepegawaian Negara
26. Lembaga Administrasi Negara
27. Badan Pangan Nasional
28. Badan Pengawas Obat dan Makanan
29. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
30. Badan Pusat Statistik
31. Badan Standardisasi Nasional
32. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
33. Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Badan Siber dan Sandi Negara
35. Kementerian Pertahanan
36. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Kota
- Kab Afirmasi
- Kota Afirmasi

Pemerintah Provinsi : 38
Pemerintah Kota : 42
Pemerintah Kabupaten : 48 +

128 Pemda

*Pemetaan merupakan highlight dari lokus yang menjadi target pembangunan kewilayahan pada Lampiran IV Perpres 12/2025, dengan fokus pada 5 use case peran pemerintah digital





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB

Summary

Fokus Instansi Pemerintah Pusat untuk *Shared Outcomes* TDP



Penurunan Kemiskinan - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

- Pemangku Kepentingan: 16 Instansi Pusat, 2 BUMN
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik s.d. Memuaskan

Iklim Usaha – Hilirisasi

Pengembangan Hilirisasi Nikel

- Pemangku Kepentingan: 6 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Sangat Baik

Pengembangan Hilirisasi Tembaga

- Pemangku Kepentingan: 4 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Sangat Baik

Pengembangan Hilirisasi Bauksit

- Pemangku Kepentingan: 5 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Memuaskan

Pengembangan Hilirisasi Timah

- Pemangku Kepentingan: 3 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Sangat Baik

Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit

- Pemangku Kepentingan: 8 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Memuaskan

Pengembangan Hilirisasi Kelapa

- Pemangku Kepentingan: 9 Instansi Pusat, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Memuaskan

Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

- Pemangku Kepentingan: 9 Instansi Pusat, Pemda, Badan Usaha
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Memuaskan

Administrasi Pemerintahan

Layanan Digital Pengadaan Barang/Jasa

- Pemangku Kepentingan: 1 Instansi Pusat (LKPP)
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik

Digitalisasi Manajemen ASN

- Pemangku Kepentingan: 3 Instansi Pusat, Pemda
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik s.d. Memuaskan

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

- Pemangku Kepentingan: 1 Instansi Pusat (ANRI)
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik

Integrasi Sistem Informasi Kinerja Nasional

- Pemangku Kepentingan: 4 Instansi Pusat
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik s.d. Memuaskan

Penerimaan Negara - Perpajakan

- Pemangku Kepentingan: 1 Instansi Pusat (Kemenkeu)
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Memuaskan

Siklus Hidup

Makan Bergizi Gratis

- Pemangku Kepentingan: 13 Instansi Pusat, Pemda
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik s.d. Memuaskan

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

- Pemangku Kepentingan: 11 Instansi Pusat, Pemda
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Baik s.d. Memuaskan

Digitalisasi Pembelajaran

- Pemangku Kepentingan: 1 Instansi Pusat, Pemda
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik

Layanan Pertanahan

- Pemangku Kepentingan: 2 Instansi Pusat
- Indeks SPBE Pemangku Kepentingan: Sangat Baik

 Kab Tambahan
  Kab Afirmasi
  Pemerintah Provinsi

 Kota Tambahan
  Kota Afirmasi
  Pemerintah Kabupaten

 Pemerintah Kota

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk *Shared Outcomes* TDP (1/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklim Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
1	Pemerintah Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh	3,64					✓
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh	2,39		✓			✓
3	Pemerintah Kab. Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh	1,86	✓				✓
4	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh	3,70		✓			✓
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara	3,86					✓
6	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	3,57		✓		✓	✓
7	Pemerintah Kab. Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	3,72	✓				✓
8	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	3,67					
9	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau	3,75					✓
10	Pemerintah Kab. Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau	2,79	✓	✓			✓
11	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau	3,85					
12	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau	3,90					✓
13	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat	3,85					✓
14	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	4,23		✓			
15	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	2,46	✓				✓
16	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	3,75					✓
17	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	3,96					
18	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi	3,05					✓
19	Pemerintah Kab. Batang Hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi	3,55					✓

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk *Shared Outcomes* TDP (2/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklim Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
20	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi	4,32					✓
21	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	3,00					✓
22	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	3,62		✓			
23	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	3,51					
24	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung	4,11					✓
25	Pemerintah Kab. Belitung	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	3,35					✓
26	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Bangka Belitung	3,81					✓
27	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu	3,92					✓
28	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	3,28	✓	✓			✓
29	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu	2,63					✓
30	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung	4,09					✓
31	Pemerintah Kab. Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung	3,99		✓			
32	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	2,94	✓				✓
33	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung	2,98					
34	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	Pemerintah Provinsi	Jakarta	4,46					✓
35	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat	4,73					✓
36	Pemerintah Kab. Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	3,75	✓	✓			✓
37	Pemerintah Kab. Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	4,51		✓			
38	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat	4,59					✓

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk *Shared Outcomes* TDP (3/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklim Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
39	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat	3,83					✓
40	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten	3,47					✓
41	Pemerintah Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten	3,45	✓	✓			✓
42	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten	3,85					✓
43	Pemerintah D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	Yogyakarta	4,53					✓
44	Pemerintah Kab. Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	3,96		✓		✓	✓
45	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	Yogyakarta	3,50				✓	
46	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah	4,42					✓
47	Pemerintah Kab. Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	3,93		✓			
48	Pemerintah Kab. Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	2,84	✓	✓			
49	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	3,95					
50	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	4,30					
51	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	3,64					
52	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur	4,43					✓
53	Pemerintah Kab. Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	3,73	✓	✓			✓
54	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	4,77		✓			
55	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur	4,54					
56	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat	3,58	✓	✓			✓
57	Pemerintah Kab. Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	2,91					✓

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk *Shared Outcomes* TDP (4/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklim Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
58	Pemerintah Kab. Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	3,38					✓
59	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat	3,49					
60	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah	2,87	✓				
61	Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	2,63		✓			
62	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah	3,75		✓			
63	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan	3,63	✓				
64	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	4,09		✓			
65	Pemerintah Kab. Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	2,99		✓			
66	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan	4,06					
67	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	3,79	✓				
68	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	3,09		✓			✓
69	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	2,87		✓			
70	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	3,85		✓			
71	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	3,96		✓			
72	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara	3,01	✓		✓		✓
73	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	2,46					✓
74	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	3,37					✓
75	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	3,93					
76	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	3,03		✓			

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk Shared Outcomes TDP (5/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklm Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
77	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo	4,13	✓	✓			✓
78	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo	2,89		✓			
79	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo	2,82					
80	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah	2,91	✓	✓			✓
81	Pemerintah Kab. Sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	2,29		✓			
82	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah	2,58					
83	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan	3,94	✓	✓			✓
84	Pemerintah Kab. Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	3,49		✓			
85	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	4,02					
86	Pemerintah Kota Palopo	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	3,12					
87	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara	2,87		✓		✓	✓
88	Pemerintah Kab. Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	3,68		✓			
89	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara	3,23		✓			
90	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali	4,30					✓
91	Pemerintah Kab. Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali	3,14	✓				
92	Pemerintah Kab. Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali	3,87					
93	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali	3,96					
94	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat	3,56	✓				✓
95	Pemerintah Kab. Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	3,05		✓			

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk Shared Outcomes TDP (6/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklim Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
96	Pemerintah Kab. Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	3,27		✓			✓
97	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat	3,55					
98	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur	3,89					✓
99	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	2,83			✓		✓
100	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur	3,14		✓			
101	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku	2,63					✓
102	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku	2,64		✓			
103	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku	2,28		✓	✓		✓
104	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara	2,69					
105	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	1,38		✓			✓
106	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara	1,89					
107	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Riau	3,05					✓
108	Pemerintah Kab. Bintan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau	3,25					✓
109	Pemerintah Kab. Natuna	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau	3,61	✓	✓		✓	✓
110	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau	3,77					✓
111	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau	3,25					✓
112	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat	3,70	✓	✓			✓
113	Pemerintah Kab. Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	2,52					
114	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	3,88		✓			

Mapping Fokus Instansi Pemerintah Daerah untuk Shared Outcomes TDP (7/7)

No.	Nama Daerah	Tingkatan Instansi (Prov/Kab/Kota)	Provinsi	Indeks SPBE	Kemiskinan	Iklm Usaha	Administrasi Pemerintah (Belanja Publik)	Penerimaan Negara	Siklus Hidup
115	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara	3,79	✓	✓			✓
116	Pemerintah Kab. Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	3,93					
117	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara	3,11					
118	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua	2,03			✓		✓
119	Pemerintah Kab. Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua	0					✓
120	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua	2,35					✓
121	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat	2,28			✓		
122	Pemerintah Kab. Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	1,75		✓			✓
123	Pemerintah Kab. Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya	2,49					
124	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat Daya	1,78					
125	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya	2,39					
126	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan	1,62					✓
127	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan	1,61					
128	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah	1,88					